BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 64 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu sumber pendapatan Desa adalah berdasarkan alokasi bagian dari hasil Pajak dan Retribusi daerah Kabupaten kepada desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten.

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf dan ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Natuna Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Desa, perlu dilakukan perubahan alokasi atas prognosa realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Natuna tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. *Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang* Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuatan Singingi, dan Kota Batam; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2013 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2014 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 34 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 53 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna tahun 2017 Nomor 34);
15. Peraturan Bupati Natuna Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 56).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KE DESA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

1. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 62 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Ke Desa Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 62) diubah sebagai berikut:

   Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

   Pasal 6

   (1) Penetapan rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap Desa di Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
   (2) Dalam hal terdapat perubahan alokasi pada tahun berjalan, maka penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan perubahan alokasi.
   (3) Perubahan alokasi berdasarkan prognosa realisasi Pajak dan Retribusi Daerah.
   (4) Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah didasarkan selisih antara pagu

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

perubahan alokasi dengan jumlah dana yang telah disalurkan pada Rekening Kas Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 27 November 2018

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 27 November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 65

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 62 TAHUN 2017 TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN HASIL
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KE DESA TAHUN ANGGARAN 2018

RINCIAN PERUBAHAN ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAERAH
DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2018

No	Kecamatan	Desa	Bagi Hasil Pajak Daerah	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Total
1	2	3	4	5	5 = 4 + 5
1	MIDAI	SEBELAT	6,837,000	105,000	6,942,000
2	MIDAI	AIR PUTIH	6,837,000	105,000	6,942,000
3	BUNGURAN BARAT	MEKAR JAYA	12,352,000	105,000	12,457,000
4	BUNGURAN BARAT	BINJAI	6,837,000	105,000	6,942,000
5	BUNGURAN BARAT	PIAN TENGAH	15,206,000	105,000	15,311,000
6	BUNGURAN BARAT	SELAUT	11,384,000	105,000	11,489,000
7	SERASAN	KAMPUNG HILIR	13,567,000	105,000	13,672,000
8	SERASAN	BATU BERIAN	11,000,000	105,000	11,105,000
9	SERASAN	TANJUNG SETELUNG	11,773,000	105,000	11,878,000
10	SERASAN	TANJUNG BALAU	9,280,000	105,000	9,385,000
11	SERASAN	PANGKALAN	6,906,000	105,000	7,011,000
12	SERASAN	JERMALIK	15,300,000	105,000	15,405,000
13	BUNGURAN TIMUR	SUNGAI ULU	14,529,000	105,000	14,634,000
14	BUNGURAN TIMUR	SEPEMPANG	7,980,000	105,000	8,085,000
15	BUNGURAN TIMUR	BATU GAJAH	13,159,000	105,000	13,264,000
16	BUNGURAN UTARA	KELARIK UTARA	15,885,000	105,000	15,990,000
17	BUNGURAN UTARA	KELARIK	9,408,000	105,000	9,513,000
18	BUNGURAN UTARA	KELARIK BARAT	7,319,000	105,000	7,424,000
19	BUNGURAN UTARA	KELARIK AIR MALI	20,008,000	105,000	20,113,000
20	BUNGURAN UTARA	TELUK BUTON	17,517,000	105,000	17,622,000
21	BUNGURAN UTARA	BELAKANG GUNUNG	15,345,000	105,000	15,450,000
22	BUNGURAN UTARA	SELUAN BARAT	9,199,000	105,000	9,304,000
23	BUNGURAN UTARA	GUNUNG DURIAN	9,951,000	105,000	10,056,000
24	SUBI	SUBI	9,398,000	105,000	9,503,000
25	SUBI	SUBI BESAR	12,900,000	105,000	13,005,000
26	SUBI	MELIAH	6,840,000	105,000	6,945,000
27	SUBI	PULAU PANJANG	6,837,000	105,000	6,942,000
28	SUBI	TERAYAK	9,788,000	105,000	9,893,000
29	SUBI	PULAU KERDAU	20,171,000	105,000	20,276,000
30	SUBI	SUBI BESAR TIMUR	6,837,000	105,000	6,942,000
31	SUBI	MELIAH SELATAN	9,099,000	105,000	9,204,000
32	PULAU LAUT	TANJUNG PALA	9,052,000	105,000	9,157,000
33	PULAU LAUT	AIR PAYANG	6,837,000	105,000	6,942,000
34	PULAU LAUT	KADUR	12,930,000	105,000	13,035,000
35	PULAU TIGA	SABANG MAWANG	7,330,000	105,000	7,435,000

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

1	2	3	4	5	5 = 4 + 5
36	PULAU TIGA	SEDEDAP	19,198,000	105,000	19,303,000
37	PULAU TIGA	TANJUNG BATANG	9,546,000	105,000	9,651,000
38	PULAU TIGA	SERANTAS	17,907,000	105,000	18,012,000
39	PULAU TIGA	SABANG MAWANG BARAT	6,837,000	105,000	6,942,000
40	PULAU TIGA	TELUK LABUH	8,369,000	105,000	8,474,000
41	BUNGURAN TIMUR LAUT	TANJUNG	13,547,000	105,000	13,652,000
42	BUNGURAN TIMUR LAUT	CERUK	13,252,000	105,000	13,357,000
43	BUNGURAN TIMUR LAUT	KELANGA	9,148,000	105,000	9,253,000
44	BUNGURAN TIMUR LAUT	PENGADAH	7,248,000	105,000	7,353,000
45	BUNGURAN TIMUR LAUT	SEBADAI HULU	14,779,000	105,000	14,884,000
46	BUNGURAN TIMUR LAUT	LIMAU MANIS	15,731,000	105,000	15,836,000
47	BUNGURAN TIMUR LAUT	SELEMAM	14,061,000	105,000	14,166,000
48	BUNGURAN TENGAH	TAPAU	12,505,000	105,000	12,610,000
49	BUNGURAN TENGAH	HARAPAN JAYA	10,098,000	105,000	10,203,000
50	BUNGURAN TENGAH	AIR LENGIT	6,837,000	105,000	6,942,000
51	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA	12,974,000	105,000	13,079,000
52	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA SELATAN	6,837,000	105,000	6,942,000
53	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA UTARA	10,386,000	105,000	10,491,000
54	BUNGURAN SELATAN	CEMAGA TENGAH	6,837,000	105,000	6,942,000
55	SERASAN TIMUR	ARUNG AYAM	14,892,000	105,000	14,997,000
56	SERASAN TIMUR	AIR NUSA	19,925,000	105,000	20,030,000
57	SERASAN TIMUR	AIR RINGAU	14,173,000	105,000	14,278,000
58	SERASAN TIMUR	PAYAK	10,310,000	105,000	10,415,000
59	BUNGURAN BATUBI	BATUBI JAYA	14,344,000	105,000	14,449,000
60	BUNGURAN BATUBI	GUNUNG PUTRI	18,595,000	105,000	18,700,000
61	BUNGURAN BATUBI	SEDARAT BARU	16,043,000	105,000	16,148,000
62	BUNGURAN BATUBI	SEDANAU TIMUR	10,408,000	105,000	10,513,000
63	BUNGURAN BATUBI	SEMEDANG	13,538,000	105,000	13,643,000
64	PULAU TIGA BARAT	PULAU TIGA	6,837,000	105,000	6,942,000
65	PULAU TIGA BARAT	TANJUNG KUMBIK UTARA	6,837,000	105,000	6,942,000
66	PULAU TIGA BARAT	SETUMUK	8,843,000	105,000	8,948,000
67	PULAU TIGA BARAT	SELADING	11,891,000	105,000	11,996,000
68	SUAK MIDAI	AIR KUMPAI	8,186,000	105,000	8,291,000
69	SUAK MIDAI	BATU BELANAK	8,825,000	105,000	8,930,000
70	SUAK MIDAI	GUNUNG JAMBAT	12,328,000	105,000	12,433,000
JUMLAH			**797,670,000**	**7,350,000**	**805,020,000**

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	